

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pengelolaan Aset Pemerintah

Sukaena Harfianah¹

Faisal²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, Indonesia

*Correspondences: sharfianah@gmail.com

ABSTRAK

Pengelolaan aset yang efisien dan efektif dinilai sangat penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dan pengelolaan keuangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengenai pengaruh sumber daya manusia, teknologi informasi, dan tata kelola terhadap pengelolaan aset pemerintah di Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS). Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda untuk menguji data. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode sistematis *random sampling* yang menghasilkan jumlah sampel sebanyak 260. Survey dilakukan dengan menggunakan google form. Pengolahan data menggunakan program SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap pengelolaan aset pemerintah, sedangkan teknologi informasi dan tata kelola berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan aset pemerintah.

Kata Kunci: Sumber Daya Manusia; Teknologi Informasi; Tata Kelola; Aset Pemerintah.

Factors Affecting Government Asset Management

ABSTRACT

Efficient and effective asset management is considered very important in improving the quality of financial reports and state financial management. This research aims to determine the influence of human resources, information technology and governance on government asset management at the Central Statistics Agency of the Republic of Indonesia (BPS). This research uses multiple linear regression analysis methods to test the data. The sampling technique used was a systematic random sampling method which resulted in a sample size of 260. The survey was carried out using a Google form. Data processing uses the SPSS 25 program. The research results show that human resource variables have no effect on government asset management, while information technology and governance have a positive and significant effect on government asset management.

Keywords: Human Resources; Information Technology; Good Governance; Government Asset.

Artikel dapat diakses : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 33 No. 10
Denpasar, 31 Oktober 2023
Hal. 2534-2549

DOI:
[10.24843/EJA.2023.v33.i10.p01](https://doi.org/10.24843/EJA.2023.v33.i10.p01)

PENGUTIPAN:
Harfianah, S., & Faisal. (2023).
Faktor-Faktor yang
Memengaruhi Pengelolaan
Aset Pemerintah. *E-Jurnal
Akuntansi*, 33(10), 2534-2549

RIWAYAT ARTIKEL:
Artikel Masuk:
1 Januari 2023
Artikel Diterima:
10 September 2023

PENDAHULUAN

Laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dan pengelolaan keuangan negara adalah dengan terus meningkatkan kualitas pengelolaan dan keterandalan penyajian aset pemerintah di seluruh kementerian negara/lembaga (Kementerian Keuangan, 2021). Pengelolaan aset merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan pengelolaan keuangan negara, karena berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan, terutama nilai aset, penggunaan aset, dan pencatatan aset dalam neraca tahunan pemerintah (Kusnawati *et al.*, 2019).

Mardiasmo *et al.* (2012) mengungkapkan Pengelolaan aset sangat penting karena dapat memperlancar pelaksanaan tugas-tugas publik, termasuk pemberian pelayanan dan dukungan lain terhadap administrasi publik. Selain itu menurut Awaludin *et al.* (2018) tujuan pemerintah dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dapat dicapai melalui pengelolaan aset yang efisien dan efektif. Puspitarini *et al.* (2017) juga mengungkapkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah pusat, secara langsung aset pemerintah mempunyai peranan sangat penting sebagai pelayanan kepada masyarakat. Sistem pengelolaan aset yang tepat dapat memastikan aset yang diinventarisasi sudah sesuai dengan standar akuntansi serta dapat berfungsi dengan baik disertai biaya yang lebih rendah, sehingga aset tersebut dapat berkontribusi pada penyediaan barang dan jasa yang efisien dan efektif (Hanis *et al.*, 2011).

Begitu pentingnya pengelolaan aset bagi pemerintah serta banyaknya belanja negara terkait dengan pengelolaan aset, mengharuskan pemerintah mengelola aset tersebut secara profesional, efektif dan mengutamakan aspek ekonomi agar menghasilkan belanja yang tepat sasaran (Salmiah *et al.*, 2018). Pekei, *et al* (2014) menyebutkan implementasi pengelolaan aset yang semakin baik, memberikan dampak semakin efektif pengelolaan aset disuatu wilayah. Peraturan Pemerintah No-28/2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara menyebutkan bahwa "Dalam perkembangannya, pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menjadi semakin kompleks, sehingga perlu dikelola secara optimal, efektif, dan efisien". Hal ini diperkuat dari hasil laporan pemeriksaan BPK untuk Laporan keuangan tahun 2021 yang menyebutkan Pengendalian atas pengelolaan aset tetap belum memadai berdampak adanya saldo BMN yang tidak akurat seperti terdapat aset tetap dengan nilai perolehan minus, aset tetap dengan nilai perhitungan saldo minus, aset tetap dengan akumulasi penyusutan positif, aset yang tercatat ganda sebagai ekstrakomptabel dan intrakomptabel, aset yang tidak dapat diketahui asal nilai perolehan, aset dengan masa manfaat yang tidak sesuai ketentuan.

Hanis, *et al* (2011) menyebutkan kesulitan yang dihadapi dalam pengelolaan aset karena tidak adanya struktur kelembagaan dan hukum; prinsip *nonprofit* dari aset untuk umum; lintas kekuasaan dalam penatausahaan aset; kompleksitas tujuan organisasi publik; penghematan anggaran yang terkait dengan aset pemerintah; aksebilitas informasi dalam mengelola aset publik; dan sumber daya manusia. Hanis, *et al* (2011) juga menambahkan, berbagai upaya pemerintah

dalam meningkatkan pengelolaan aset, yang bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, ekonomis, akuntabel dalam penggunaan aset yang di dukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pengelolaan aset merupakan strategi komprehensif dalam mengelola manusia, informasi dan teknologi secara efektif dan efisien dengan mengalokasikan anggaran yang tersedia dalam memenuhi kebutuhan aset yang bermanfaat (Kusnawati *et al.*, 2019). Sinkronisasi antara Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) sangat dibutuhkan dalam pengelolaan aset pemerintah (Wahyuni *et al.*, 2018).

Dalam pengelolaan aset diperlukan sumber daya yang cukup dan kompeten, koordinasi antarbagian yang berhubungan dengan pengelolaan aset, serta adanya kesadaran dan kepedulian seluruh pegawai terhadap Barang Milik Negara (BMN) (Awaludin *et al.*, 2018). Mengembangkan kemampuan SDM merupakan bagian terpenting yang dapat menentukan berhasil tidaknya pengelolaan aset pemerintah. Hal ini berkaitan dengan produktivitas SDM agar dapat berdaya saing serta unggul menghadapi berbagai kesulitan dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan global yang berubah-ubah, baik itu terkait dengan tugas baru, maupun dengan perkembangan teknologi (Gaffar *et al.*, 2017).

Schraven, *et al* (2011) menyebutkan pemerintah harus memberikan pelatihan dan kursus tentang pengelolaan aset karena penerapan prinsip pengelolaan aset membutuhkan personil yang handal untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan dalam mengatasi berbagai tantangan pengelolaan aset. Beberapa penelitian menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat konsistensi antara sumber daya manusia dengan pengelolaan aset terkait sumber daya manusia. Seperti hasil penelitian Wahyuni, *et al* (2018) di mana kualitas SDM mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengelolaan aset pemerintah daerah. Puspitarini, *et al* (2017) juga menyebutkan faktor SDM memiliki pengaruh pada penerapan akuntansi di BMN yang menggunakan basis akrual. Hasil penelitian Subrata, *et al* (2018) membuktikan kualitas dari laporan BMD memberikan pengaruh yang positif pada kemampuan sumber daya manusia. Namun hasil penelitian di atas bertolak belakang dengan hasil kajian yang di lakukan Kurniyanta, *et al* (2018) yang menyebutkan bahwa SDM yang kompeten tidak berpengaruh dalam memaksimalkan aset yang tidak digunakan di unit kerja di wilayah KPKNL Jember. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Mardianto, (2021) yang menyebutkan SDM tidak memengaruhi pengelolaan aset.

Pengelola BMN dapat meningkatkan kualitas informasi mengenai BMN melalui peran teknologi informasi (Puspitarini *et al.*, 2017). Kurang akuratnya informasi yang relevan dan rinci tentang aset modal pemerintah dapat dianggap sebagai hambatan dalam mengadopsi tata kelola sektor publik yang sehat (Ouda, 2015). Teknologi informasi digunakan oleh organisasi dengan maksud mempercepat dalam pemecahan masalah, membuat kreativitas, serta efektif dan efisien dalam melakukan pekerjaan (Rachmawati *et al.*, 2018). Revolusi teknologi memiliki dampak besar pada pengelolaan aset pemerintah, termasuk efisiensi, transparansi, dan perubahan pada operasi pemerintah (Kaganova dan Amoils, 2020).

Pemerintah harus mengoptimalkan manfaat dari kemajuan teknologi dan informasi dalam menyusun kerangka kerja sistem informasi organisasi serta sistem operasi yang mengharuskan pemerintah bekerja secara terintegrasi agar

mempermudah akses antarbagian (Suwanda, 2015). Penggunaan sistem informasi dalam pengelolaan BMN menjadi bagian penting dari manajemen aset pemerintah yang akuntabel, transparan dan lebih tertib (Nuryati *et al.*, 2020). Beberapa penelitian mengenai teknologi informasi juga belum memberikan hasil yang konsisten. Hasil penelitian Rachmawati, *et al* (2018) menyebutkan penggunaan teknologi informasi yang semakin baik dapat meningkatkan keefektifan penatausahaan aset. Selanjutnya Puspitarini *et al.* (2017) mengungkapkan bahwa BMN yang memiliki basis akrual dalam penerapan akuntansi tidak memiliki pengaruh akan penggunaan teknologi informasi.

Pada penelitian ini menambahkan variabel tata kelola pemerintahan sebagai bagian yang berkontribusi dalam pengelolaan aset. Ouda (2015) menyebutkan tata kelola yang baik mempunyai peranan penting dalam mencapai tujuan pengelolaan aset. Menurut Awaludin, *et al* (2018) dalam pengelolaan aset, harus menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Terselenggaranya pemerintahan publik yang baik merupakan bagian dari penerimaan umum mengenai aset modal publik dengan pelaporan dan pengungkapan informasi melalui transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan dengan cara operasional hingga *financial* (Ouda, 2015). Tata kelola yang baik diakui sebagai hal penting dalam pengelolaan aset yang baik, tetapi pengenalannya menghadapi banyak tantangan (misalnya, kurangnya pemahaman terpadu tentang implikasinya, kurangnya keahlian yang memenuhi syarat di antara pembuat aturan, dll) (Kaganova dan Amoils, 2020).

Ouda (2015) menyebutkan untuk mencapai tujuan pengelolaan aset yang efisien, harus ada sistem akuntansi dan pelaporan yang memfasilitasi akuntansi dan akuntabilitas aset modal pemerintah yang dapat mengarah pada tata kelola aset yang lebih baik. Pentingnya pendekatan tata kelola dan pengelolaan aset negara diakui oleh berbagai pemerintah di seluruh dunia termasuk Indonesia, yang berusaha mematuhi prinsip tata kelola yang baik dalam peraturan serta kebijakan penatausahaan aset negara (Mardiasmo *et al.*, 2012). Hal yang sama diungkapkan Awaludin, *et al* (2018) di mana penerapan tata kelola dalam pemerintahan memberikan pengaruh positif pada pengelolaan aset negara.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris terkait pengaruh kompetensi sumber daya manusia, teknologi informasi dan penerapan tata kelola terhadap pengelolaan aset negara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis, serta bagi pihak yang berkepentingan lainnya. Penggunaan teori Stewardship dalam penelitian ini karena dalam teori *stewardship* seorang pengelola diatur sedemikian rupa sehingga perilaku kolektivistik mempunyai makna yang lebih tinggi dari perilaku individualisme dalam mencapai tujuan organisasi, teori ini juga lebih memotivasi manfaat pelayanan yang diarahkan ke organisasi daripada objek pribadi (Davis *et al.*, 1997). Ada dua dimensi yang dicirikan dalam teori *stewardship* yaitu faktor psikologis dan faktor situasional. Kedua faktor ini mengarahkan seseorang pada sikap melayani. Mekanisme psikologi dipengaruhi oleh motivasi, indentifikasi dan kekuasaan sedangkan mekanisme situasional digunakan untuk menjelaskan pola kepemimpinan dan hubungan dengan antara atasan dengan bawahan yang meliputi filosofi manajemen dan perbedaan budaya (Raharjo, 2007). Faktor psikologis dan

situasional tersebut memposisikan pemerintah sebagai pelayan yang memiliki tujuan sama dengan organisasi yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat (prinsipal).

Seorang *steward* akan menjaga dan memanfaatkan kekayaan prinsipal dengan maksimal melalui kinerja organisasi, sehingga fungsi utilitas *steward* dapat dimaksimalkan (Davis *et al.*, 1997). Dalam teori *stewardship* faktor psikologis berfokus pada penghargaan intrinsik yang tidak mudah diukur. Penghargaan ini mencakup pada kesempatan untuk berkembang, berprestasi, berafiliasi dan mengaktualisasikan diri yang diharapkan dapat menambah motivasi kerja pegawai (Davis *et al.*, 1997). Selain itu Davis *et al.* (1997) juga menjelaskan bahwa teori ini menggambarkan hubungan kepengurusan yang diperkuat oleh penghargaan intrinsik, imbalan tidak berwujud serta motivasi untuk lebih bekerja keras atas nama organisasi.

Asumsi motivasi dalam teori *stewardship* memiliki kesesuaian dengan kompetensi sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi pemerintahan, sistem *reward* yang dijadikan motivasi difokuskan pada asas keadilan dimana tambahan *reward* akan diberikan pada individu yang memelihara kredibilitas dan bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan (Pasoloran & Rahman, 2001). Lebih lanjut Pasoloran dan Rahman, (2001) menjelaskan dengan mengembangkan diri menggunakan potensi yang ada pada diri sendiri, mereka merasa mendapatkan *reward* yang tidak dapat dinilai secara finansial.

Menurut Hernandez (2008) dalam teori *stewardship* komitmen organisasi sangat penting berupa kepercayaan dan penerimaan tujuan organisasi, sehingga menciptakan rasa koherensi dalam organisasi salah satunya dengan memfasilitasi kemampuan mereka untuk lebih memahami implikasi dari tindakan organisasi. Pemerintah perlu mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk membangun proses kerja yang lebih efektif sehingga memungkinkan melakukan tugas secara terpadu dengan penyederhanaan akses antarbagian maupun akses keluar. Dalam proses pengelolaan aset pemerintah, penggunaan teknologi informasi diperlukan mulai dari proses perencanaan sampai siklus hidup aset tersebut selesai.

Tujuan diterapkannya tata kelola pemerintahan agar dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang kuat, memiliki rasa tanggungjawab, serta efisien dan efektif dalam menjaga hubungan interaksi negara dengan negara lainnya, sektor swasta, dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori *stewardship* dimana teori ini menggambarkan setiap individu memiliki rasa tanggungjawab, dapat diandalkan, integritas tinggi yang mana sifat tersebut dilakukan tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri tetapi ditujukan kepada kepentingan bersama dan kepentingan masyarakat. Teori *stewardship* merupakan perilaku yang mementingkan kebutuhan jangka panjang organisasi dibandingkan kepentingan pribadi (Hernandez, 2008).

Dalam praktik pengelolaan aset pemerintah akan berbeda tiap negara, misalnya definisi pengelolaan aset pemerintah dan kategorisasi aset pemerintah, tingkat keterlibatan pihak ketiga (kemitraan publik-swasta), sistem akuntansi dan pelaporan yang ada, sistem informasi dan pengelolaan data, dan tingkat pemisahan kewenangan antara berbagai tingkat pemerintah (Mardiasmo *et al.*, 2012). Menurut Siregar (2020) melakukan penatausahaan aset dengan baik dan

benar, diharapkan penggunaan aset akan lebih efektif dan efisien yang kemudian memberikan nilai bagi pembangunan negara. Selanjutnya Lu (2017) menyebutkan ada enam landasan sistem pengelolaan aset yaitu persyaratan hukum dan peraturan, organisasi manajemen, manajemen aset sepanjang penggunaan, strategi sumber daya manusia, teknologi informasi, serta pemantauan dan transparansi.

Menurut Sedarmayanti (2019), peranan sumber daya manusia sangat penting untuk mencapai organisasi kompetitif dalam era globalisasi yang sedang berkembang, tanpa kompetensi sumber daya manusia dalam bidang pekerjaan dan tanggungjawabnya, maka eksistensi organisasi tidak akan terwujud. Penempatan pegawai yang tepat, pelatihan dan koordinasi merupakan faktor penting dalam mendukung efektivitas pengelolaan aset (Pekei *et al.*, 2014). Dalam perspektif perencanaan strategis pengelolaan tenaga kerja dalam pengelolaan aset harus memperhatikan pengembangan bakat profesional karyawan secara berkelanjutan dan perluasan visi profesional karyawan. Sedangkan dari segi perencanaan operasional karyawan baru yang akan menangani pengelolaan aset harus diberikan pelatihan khusus yang berorientasi pada tugas. Bagian terpenting dalam sumber daya manusia adalah keterampilan, keahlian dan pengetahuan yang dimiliki (Pekei *et al.*, 2014).

Sistem pengambilan keputusan telah diperbaiki dalam memecahkan masalah dan teknologi merupakan komponen penting yang bekerja sama dengan manajemen informasi di mana manajemen informasi merupakan komponen kunci dalam sistem manajemen aset (Lu, 2017). Perkembangan teknologi informasi membuktikan bahwa dengan memproses data menggunakan teknologi informasi (jaringan dan komputer) memberikan banyak keuntungan baik dari segi akurasi/presisi hasil operasi maupun predikat sebagai multiguna, sehingga dapat mengurangi kesalahan yang terjadi (Dewi & Hoesada, 2020). Informasi dianggap sebagai sumber daya organisasi dalam sistem manajemen aset pemerintah.

Peraturan Pemerintah No.27/2014 pasal 3 menyebutkan "Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai." Ouda (2015) mengatakan terkait dengan pemerintahan yang baik dapat membantu tercapainya tujuan organisasi dan tata kelola yang efektif mendorong pengambilan keputusan yang lebih baik dan penggunaan sumber daya yang efisien serta memperkuat akuntabilitas untuk pengelolaan sumber daya tersebut. Selain itu dalam rangka menyediakan masyarakat dengan kualitas layanan yang baik sebagai imbalan atas sumber daya keuangan yang diterima, maka pemerintah perlu menciptakan lingkungan untuk pengelolaan aset yang lebih baik, profesional dan bertanggung jawab (Ouda, 2015). Pelaksanaan prinsip tata kelola yang baik bertujuan menciptakan tertib administrasi dalam mengelola BMN untuk menetapkan status penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan BMN (Awaludin *et al.*, 2018).

Dalam pendekatan *stewardship*, sumber daya manusia akan termotivasi untuk mencapai tujuan organisasi, motivasi ini ditujukan pada pencapaian yang bersifat intrinsik yaitu tidak mudah diukur seperti kesempatan untuk mengembangkan diri, aktualisasi diri, prestasi dan berafiliasi (Pasoloran & Rahman, 2001). Dalam pengelolaan aset pemerintah, SDM dengan kompetensi

yang tinggi dapat mengoptimalkan pengelolaan aset pemerintah, sebaliknya dengan kompetensi SDM yang rendah dapat menurunkan kualitas dari pengelolaan aset tersebut (Wahyuni *et al.*, 2018; Kusnawati *et al.*, 2019). Pegawai yang kompeten dapat menjelaskan logika akuntansi sehingga laporan yang disajikan semakin baik (Daryanto *et al.*, 2020). Semakin tingginya kompetensi dan keterampilan SDM yang dimiliki ketika menyusun laporan BMN menjadi penentu dari keberhasilan diterapkannya akuntansi berbasis akrual pada pengelolaan BMN (Subrata *et al.*, 2018; Puspitarini *et al.*, 2017).

H₁ : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pengelolaan aset pemerintah.

Dalam teori *stewardship*, seorang *steward* akan memanfaatkan sumber daya yang dikuasai agar tujuan dari organisasinya tercapai (Hernandez, 2008). *Steward* mengerahkan segala kemampuan dan keahlian yang dimiliki salah satunya dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk kepentingan *principal* (Jatmiko *et al.*, 2020). Penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah memengaruhi efektivitas pengelolaan aset, semakin baik penggunaan teknologi dan informasi maka efektivitas pengelolaan aset semakin tinggi (Rachmawati *et al.*, 2018). Hal yang sama diungkapkan Daryanto, *et al* (2020) bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat mendukung kinerja pegawai dalam menyajikan laporan yang semakin baik. Dalam pengelolaan aset penerapan teknologi informasi yang semakin baik menghasilkan perencanaan strategi pengelolaan aset strategi yang lebih baik (Sanjaya & Utama, 2020). Penerapan sistem informasi manajemen aset yang baik akan mengakomodir seluruh tahapan pengelolaan aset yang berdampak pada peningkatan kinerja pengelolaan aset (Charisma, 2020).

H₂ : Penggunaan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap pengelolaan aset pemerintah.

Teori *stewardship* merupakan salah satu pendekatan dalam pengelolaan organisasi yang dapat mengatasi isu sehubungan tata kelola perusahaan dan tata kelola perusahaan yang baik, sebab tata kelola perusahaan akan tercipta jika ada keseimbangan kepentingan antara semua pihak dalam mewujudkan mencapai tujuan organisasi (Pasoloran & Rahman, 2001). Awaludin, *et al* (2018) menyebutkan penerapan prinsip tata kelola pemerintahan bisa memengaruhi pengelolaan manajemen aset menjadi semakin baik. Selanjutnya tata kelola pemerintah menentukan pengawasan, transparansi, akuntabilitas, prediktabilitas, dan kewajaran, dan partisipasi dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan (Sahabuddin *et al.*, 2021). Akuntabilitas publik memiliki peran penting agar pengelolaan aset dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel sehingga memengaruhi efektivitas pengelolaan aset (Pekei, *et al* (2014); Kusnawati, *et al* (2019)).

H₃ : Penerapan tata kelola berpengaruh positif terhadap pengelolaan aset pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Badan Pusat Statistik, karena satker Badan Pusat Statistik tersebar hampir di seluruh Indonesia, kecuali untuk Kabupaten/Kota yang baru terbentuk, BPS belum mempunyai perwakilan. Setiap satker BPS juga mengelola sendiri anggaran belanja dan aset yang dimiliki. Adapun responden yang

digunakan pada penelitian ini sebagai populasi meliputi seluruh satuan kerja (satker) BPS yang tersebar di seluruh Indonesia berjumlah 517 satker. Berdasarkan dari populasi yang ada maka dilakukan penarikan sampel dengan menggunakan pengambilan sampel acak sistematis (*systematic random sampling*). Hal pertama yang dilakukan dalam pengambilan sampel ini adalah dengan menentukan populasi dan menyusun sampling frame selanjutnya menentukan jumlah sampel yang akan diteliti, kemudian menentukan kelas interval (K) setelah itu dilakukan pengambilan sampel mulai dari angka atau nomor urut yang telah ditentukan, dilanjutkan dengan menggunakan angka interval yang sudah di tentukan sebelumnya. Dalam menentukan banyaknya jumlah sampel yang di teliti menggunakan perhitungan dengan rumus slovin. Jadi jumlah sampel minimal adalah $n = 517 / (1 + (517 \times 0,052)) = 225,52 \sim 226$. Untuk mendapatkan gambaran populasi yang tepat dan keyakinan yang tinggi atas respon rate, maka peneliti menambahkan jumlah sampel sebesar 15% dari jumlah sampel (n) sehingga jumlah sampel menjadi 260 (m). Variabel terikat pada penelitian ini adalah pengelolaan aset (Y), kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan penerapan tata kelola merupakan variabel independen dalam penelitian ini.

Indikator pengelolaan aset didasarkan pada PP Nomor 28 Tahun 2020 yaitu: Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan pemeliharaan; Penilaian; Pemindahtanganan; Pemusnahan; Penghapusan; Penatausahaan; dan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Kuesioner yang digunakan merupakan adaptasi dari kuesioner Sianipar (2021) dengan melakukan pengembangan berdasarkan PP 28 Tahun 2020. Kuesioner ini terdiri dari 18 butir pernyataan. Indikator pemanfaatan teknologi informasi yaitu: Komputer/laptop yang digunakan mencukupi dan sudah sesuai dengan kebutuhan, Pemanfaatan jaringan internet, Proses akuntansi/pengelolaan barang dilakukan secara komputerisasi, Penggunaan software sesuai dengan undang-undang. Pengukuran variabel ini menggunakan kuesioner dengan 7 butir pernyataan yang merupakan hasil adaptasi dan pengembangan instrumen kuesioner yang dibuat oleh Siregar (2016). Indikator tata kelola menurut *United Nation Development Programme* (UNDP) sebagai berikut Legitimasi dan Pendapat (Partisipasi, Orientasi Konsensus), Petunjuk (Visi Strategi), Kinerja (Ketanggapan, Efisiensi dan Efektivitas) Akuntabilitas (Transparansi, Akuntabilitas) Keadilan (Aturan Hukum, Pemerataan). Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini diadaptasi dan dikembangkan dari penelitian Awaludin *et al* (2018). Kuesioner ini terdiri dari 14 butir pernyataan.

Pembagian kuesioner melalui E-mail yang kemudian diisi melalui *google-form* oleh pegawai yang bekerja pada seluruh satker Badan Pusat Statistik yang melaksanakan kegiatan pada bagian pengelolaan aset merupakan proses yang dilakukan untuk pengumpulan data di mana sampel penelitian didapatkan dengan memilih responden. Waktu penelitian dalam mengumpulkan data antara tanggal 14 April - 23 April 2022. Dalam penelitian ini, data kemudian diolah program SPSS (*Statistical Package for Social Science*) versi 25, dengan menggunakan analisis regresi linier berganda.

Kebenaran kuesioner penelitian, yang digunakan kemudian dibuktikan terlebih dahulu. Pengujian dilakukan melewati uji keabsahan data berupa uji validitas, uji reliabilitas, dan pengujian asumsi klasik berupa uji normalitas, uji

heteroskedastisitas, uji multikolonieritas, serta uji hipotesis berupa koefisien determinasi (R^2), uji statistik F, dan uji statistik t.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hingga batas waktu yang ditentukan, sebanyak 247 responden atau 95% telah menjawab kuesioner dan 13 responden tidak menjawab. Berdasarkan jenis kelamin jumlah reponden laki-laki sebanyak 106 (42,91%) dan perempuan 141 (57,09%), berdasarkan masa jabatan dalam pengelolaan aset kurang dari 1 tahun sebanyak 54 (21,86%) responden, 1-5 tahun sebanyak 152 (61,54%) responden dan lebih dari 5 tahun sebanyak 41 (16,60%) responden, untuk tingkat pendidikan lulusan SMA sederajat sebanyak 21 (8,50%) responden, Diploma I/II/III sebanyak 39 (15,79%) responden, Diploma IV/S1 sebanyak 175 (70,85%) responden dan lulusan S2 sebanyak 12 (4,86%) responden. Sedangkan untuk latar belakang pendidikan jurusan Akuntansi hanya sebanyak 14 (5,67%) responden, Manajemen sebanyak 32 (12,96%) responden, Statistik sebanyak 106 (42,91%) responden dan lainnya sebanyak 95 (38,46%) responden.

Pengujian validitas pada setiap pernyataan dapat dilihat dari nilai *corrected item* bisa dilihat dimana nilai hitung/korelasi lebih besar dibandingkan nilai r-tabel, atau dengan melihat nilai p-value lebih kecil dibandingkan 0,05. Nilai r-tabel pada penelitian ini sebesar 0,1249 oleh sebab itu uji validitas pada variabel sumber daya manusia, teknologi informasi, tata kelola dan pengelolaan aset menunjukkan bahwa semua indikator yang ada pada masing-masing variabel adalah valid atas masing-masing variabel pada semua indikator dengan nilai korelasi pearson 0,3 – 0,8 lebih besar dibandingkan nilai r-tabel dan nilai p-value keseluruhan 0,000 lebih kecil dibandingkan 0,05.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Indikator Variabel	Uji Validitas		
	Korelasi Pearson	p-value	Keterangan
	Sumber Daya Manusia (X1)		
X1.1, X1.2, X1.3, X1.4, X1.5, X1.6, X1.7, X1.8	0,682; 0,671; 0,796; 0,742; 0,630; 0,392; 0,767; 0,702	0,000	Valid
	Teknologi Informasi (X2)		
X2.1, X2.2, X2.3, X2.4, X2.5, X2.6, X2.7	0,700; 0,703; 0,703; 0,726; 0,639; 0,518; 0,667	0,000	Valid
	Tata Kelola (X3)		
X3.1, X3.2, X3.3, X3.3, X3.4, X3.5, X3.6, X3.7, X3.8, X3.9, X3.10, X3.11, X3.12, X3.13, X3.14	0,512; 0,701; 0,662; 0,602; 0,494; 0,728; 0,729; 0,648; 0,598; 0,738; 0,504; 0,444; 0,701; 0,642	0,000	Valid
	Pengelolaa Aset (Y)		
Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, Y9, Y10, Y11, Y12, Y13, Y14, Y15, Y16, Y17, Y18	0,542; 0,707; 0,600; 0,720; 0,736; 0,786; 0,743; 0,722; 0,786; 0,771; 0,671; 0,790; 0,815; 0,812; 0,727; 0,600; 0,609; 0,608	0,000	Valid

Sumber: Data Penelitian, 2022

Dalam pengukuran kuesioner akan menggunakan uji reliabilitas sebagai indikator dari variabel. Pengujian reliabilitas digunakan pada penelitian ini

melalui yaitu menggunakan *Cronbach's Alpha* (α). Nilai *Cronbach's Alpha* (α) lebih besar dari 0,70, maka variabel penelitian tersebut dinyatakan reliabel. Berdasarkan hasil pengolahan data yang menggunakan SPSS menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* (α) dari semua variabel lebih besar dari 0,70, yaitu sumber daya manusia 0,819, teknologi informasi 0,790, tata kelola 0,876, dan pengelolaan aset 0,939, sehingga semua variabel dalam penelitian dapat dikatakan reliabel.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Item Pertanyaan	Uji Reabilitas		Keterangan
			<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Cronbach's Alpha Based on Standardized Items</i>	
1	Sumber Daya Manusia (X1)	8	0,819	0,835	Reliabel
2	Teknologi Informasi (X2)	7	0,790	0,792	Reliabel
3	Tata Kelola (X3)	14	0,876	0,878	Reliabel
4	Pengelolaan Aset (Y)	18	0,939	0,942	Reliabel

Sumber: Data Penelitian, 2022

Uji statistik Kolmogorov-Sminov (K-S) digunakan pada penelitian ini sebagai metode untuk pendeteksian normalitas distribusi data. Berdasarkan hasil uji *Kolmogorov-Sminov* didapat nilai *asympt sig* sebesar $0,000 < 0,05$. Melalui hasil tersebut residual data tidak berdistribusi normal, sehingga proses pengolahan data dilanjutkan dengan menggunakan metode *Monte Carlo* (Ghozali, 2018). Setelah melakukan uji normalitas dengan menggunakan *exact test Monte Carlo* dimana tingkat *confidence level* sebesar 95% menunjukkan hasil $0,103 > 0,05$, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa residual data penelitian berdistribusi normal.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

Keterangan	Unstandardized Residual
N	247
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,000 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)-Sig	0,103 ^d

Sumber: Data Penelitian, 2022

Nilai *tolerance* dan *Variance Inflator Factor* (VIF) digunakan untuk menentukan hasil uji multikolinieritas pada penelitian ini. Nilai *tolerance* $\geq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \leq 10$ yang dipakai pada nilai *cut off*. Bersumber pada hasil perhitungan dapat dilihat bahwa seluruh variabel independen dinyatakan tidak memiliki multikolinieritas pada model regresi yang didasarkan pada nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji *Glejser* dengan SPSS-25. Uji *Glejser* dengan SPSS-25 digunakan pada uji heteroskedastisitas. Dalam uji heteroskedastisitas didapat nilai *sig* pada variabel sumber daya manusia dengan nilai 0,627, teknologi informasi sebesar 0,359 dan tata kelola 0,170, sehingga dapat dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas jika tingkat kepercayaan melebihi 0,05.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas dan Uji Heteroskedastisitas

Model	Collinearity Statistics		Heteroskedastisitas	
	Tolerance	VIF	Statisitik t	Sig
Sumber Daya Manusia	0,713	1,403	-0,486	0,627
Teknologi Informasi	0,621	1,611	0,919	0,359
Tata Kelola	0,544	1,838	-1,376	0,170

Sumber: Data Penelitian, 2022

Koefisien dari variabel independen sumber daya manusia, teknologi informasi dan tata kelola menunjukkan angka positif. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen adalah positif. Pengaruh yang paling besar berada pada tata kelola pemerintahan sebesar 86,3%. Berikut akan dijabarkan mengenai hasil dari uji regresi linier berganda yaitu:

Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,535	3,771		0,407	0,684
Sumber Daya Manusia	0,104	0,077	0,063	1,353	0,177
Teknologi Informasi	0,758	0,134	0,281	5,673	0,000
Tata kelola	0,863	0,082	0,555	10,486	0,000
R ²	0,630				
Adjusted R Square	0,625				
F-Statistic	137,916				
Prob. (F-Statistic)	0,000 ^b				

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui nilai *adjusted R²* sebesar 62,50%, sehingga dapat menjelaskan bahwa variabel independen (sumber daya manusia, teknologi informasi dan tata kelola) mampu menjelaskan sebanyak 62,50% variasi yang terjadi pada variabel dependen (pengelolaan aset). Sedangkan sisanya sebesar 37,50% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini. Uji F dilakukan guna mengetahui signifikansi pengaruh keseluruhan variabel independen yaitu sumber daya manusia (X_1), teknologi informasi (X_2) dan tata kelola (X_3) terhadap variabel dependen yaitu pengelolaan aset (Y). Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa nilai F hitung 137,916 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 artinya variabel independen kompetensi sumber daya manusia, teknologi informasi, penerapan tata kelola secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengelolaan aset pemerintah.

Untuk memperoleh informasi mengenai seberapa besar pengaruh satu variabel independen secara individual dengan menjelaskan variabel dependen yaitu dengan dilakukan uji t. Ketentuan uji t yaitu apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka hipotesis H_0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Berdasarkan tabel 5 diperoleh hasil pengujian hipotesis pertama (H_1) menyebutkan pengelolaan aset tidak dipengaruhi oleh variabel sumber daya manusia, karena nilai *sig* sebesar 0,177 lebih besar dari nilai koefisien regresi yang berada pada tingkat signifikansi 0,05, H_1 ditolak.

Menurut teori *stewardship* eksistensi pemerintah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan

melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut maka *stewards* (BPS) mengerahkan segala kemampuan yang dimiliki agar bisa mengelola aset secara efisien dan efektif. Untuk dapat mengoptimalkan pengelolaan aset diharuskan mempunyai sumber daya manusia yang kompeten dengan dukungan latar belakang pendidikan memadai, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan dan mempunyai pengalaman di bidangnya.

Penghargaan dalam teori *stewardship* berupa kesempatan untuk meningkatkan diri, berprestasi, asosiasi, dan aktualisasi diri. Penghargaan ini yang belum dilakukan secara merata di seluruh satker BPS, hal ini dapat diketahui dari karakteristik responden yaitu beberapa responden belum sepenuhnya ditempatkan pada luposisi yang memiliki kesesuaian dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki, dari total jumlah responden, yang berlatar belakang pendidikan jurusan akuntansi hanya sebanyak 14 responden. Selain itu BPS belum secara keseluruhan memberikan pelatihan dan seminar yang berkaitan dengan pengelolaan aset secara rutin dan terarah. Hal ini berdampak dalam pengelolaan BMN di BPS, dari hasil temuan BPK masih didominasi mengenai pengelolaan aset. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Kurniyanta *et al* (2018) serta penelitian Mardianto, (2021) yang menyebutkan kinerja pengelola aset BMN tidak memiliki pengaruh atas sumber daya manusia. Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan Wahyuni *et al.*, (2018); Puspitarini *et al.*, (2017) yang menyebutkan pengelolaan aset pemerintah dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia.

Hasil pengujian hipotesis kedua (H_2) menyatakan variabel teknologi informasi memiliki pengaruh positif dan signifikan atas pengelolaan aset, disebabkan nilai sig sebesar 0,000 lebih kecil dibandingkan nilai koefisien regresi yang berada pada tingkat signifikansi 0,05, atau H_2 diterima. BPS sangat memahami pentingnya teknologi informasi dalam pengelolaan aset dengan mengupayakan untuk setiap pengelola aset memiliki sarana pendukung seperti laptop khusus untuk operator BMN. Hal ini membuktikan bahwa kebutuhan dan penggunaan teknologi informasi pada Badan Pusat Statistik sangat diperhatikan dan telah dimanfaatkan semaksimal mungkin.

Teori *stewardship* memiliki gambaran atas hubungan yang terjalin secara kuat mengenai kepuasan dan kesuksesan organisasi. Tercapainya kesuksesan organisasi dapat dilakukan dengan *utilitas principals* dan manajemen secara maksimal. Seorang *steward* dalam menjalankan tanggungjawabnya dengan mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki termasuk memanfaatkan teknologi informasi untuk mencapai tujuan organisasi (Jatmiko, *et al.*, 2020). Hasil yang didapatkan pada penelitian ini didukung dengan hasil penelitian (Sanjaya & Utama, (2020); Rachmawati *et al.*, 2018). Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Puspitarini *et al* (2017) yang diketahui bahwa teknologi informasi tidak berpengaruh pada penerapan akuntansi dengan menggunakan basis akrual pada BMN. Serta penelitian Wahyuni *et al* (2018) yang mengungkapkan bahwa pengelolaan BMD tidak dipengaruhi oleh teknologi informasi.

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H_3) menyebutkan variabel tata kelola berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan aset, disebabkan nilai sig sebesar 0,000 lebih kecil dibandingkan nilai koefisien regresi yang berada

pada tingkat signifikansi 0,05, atau dikatakan H_3 diterima. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tata kelola pada BPS telah terlaksana dengan baik, hal ini dapat diketahui dari pengelolaan aset yang mengacu ada peraturan pemerintah, kesesuaian antara standar dan prosedur, pembuatan laporan yang sesuai dengan peraturan dan pengungkapan yang jujur dalam pembuatan laporan, disertai pemanfaatan BMN yang seefektif mungkin sehingga mengakibatkan tingkat kepercayaan kepada pengelola BMN meningkat.

Pada teori *stewardship*, salah satu bentuk dari tata kelola yang baik dalam organisasi yaitu dengan menganggap *steward* (pemerintah) lebih mengutamakan kepentingan prinsipal (masyarakat). BPS sebagai *steward*, perlu membuat pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukannya sebagai bentuk akuntabilitas publik salah satunya dengan mengelola aset negara yang berada dalam kekuasaannya secara transparan, efektif dan efisien. Oleh karena itu, perwujudan atas teori *stewardship* dengan dilaksanakan *good government governance*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Awaludin *et al* (2018) yang menyimpulkan bahwa dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh tata kelola, pelaksanaan prinsip tata kelola yang baik bertujuan menciptakan tertib administrasi dalam mengelola aset untuk menetapkan status penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan BMN. Hasil penelitian Kusnawati *et al.* (2019) juga mengungkapkan akuntabilitas publik memiliki peran penting agar pengelolaan aset dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel sehingga memengaruhi efektivitas pengelolaan aset.

KESIMPULAN

Bersumber pada hasil analisis data dan pengujian hipotesis pada penelitian ini dimana pengelolaan aset pemerintah tidak dipengaruhi oleh sumber daya manusia. Teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan aset, pemanfaatan teknologi yang maksimal akan memengaruhi pengelolaan aset sehingga informasi yang dibutuhkan bagi pihak yang berkepentingan tepat dan cepat. Tata kelola menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengelolaan aset, hal ini membuktikan bahwa tata kelola yang dilaksanakan dengan baik dapat meningkatkan tingkat kepercayaan kepada pengelola BMN mengenai laporan yang dihasilkan. Prinsip tata kelola pemerintah bisa memengaruhi pengelolaan manajemen aset menjadi semakin baik

Penelitian ini memiliki keterbatasan dimana terbatasnya literatur mengenai pengelolaan aset pemerintah pusat yang dapat dijadikan rujukan, sehingga dalam penelitian ini beberapa literatur yang dijadikan rujukan mengenai laporan keuangan pemerintah, dan mengenai aset pemerintah daerah. Penelitian ini juga memakai data primer yang memungkinkan adanya subjektivitas yang ada pada responden, sehingga hasil penelitian kurang maksimal. Beberapa masukan untuk penelitian selanjutnya dapat menambah metode survei selain melalui penyebaran kuesioner juga melakukan wawancara lebih mendalam untuk mendapatkan informasi tambahan, menggunakan data sekunder serta menambah jumlah responden agar diperoleh informasi lebih akurat mengenai fenomena yang terjadi terkait pengelolaan aset.

REFERENSI

- Awaludin, I., Suharman, H., & Fitriyah, F. K. (2018). Pengaruh Intellectual Capital dan Penerapan Prinsip Good Governance oleh Pengelola Barang Milik Negara terhadap Penerapan Manajemen Aset Tetap. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 3(2), 174-186. <https://doi.org/10.30871/jaat.v3i2.893>
- Charisma, D. (2020). Delone and Mclean Models in the Implementation of Asset Management Information System Analysis. *Sosiohumaniora*, 22(3), 299. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v22i3.28305>
- Daryanto, W. M., Sari, B. P., & Putri, M. A. A. (2020). Effect of Human Resources Competence, the Use of Information Technology, and Internal Control System of the Quality of Local Government Financial Reporting. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 21(2), 1-8.
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a Stewardship Theory of Management. *Academy of Management Review*, 22(1), 20-47.
- Dewi, R., & Hoesada, J. (2020). The effect of government accounting standards, internal control systems, competence of human resources, and use of information technology on quality of financial statements. *International Journal of Innovative Research and Advanced Studies (IJIRAS)*, 7(1), 4-10.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49-64. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Gaffar, I., Hasanuddin, B., & Kusumawati, A. (2017). Pengaruh Inventarisasi Aset, Sumber Daya Manusia Terhadap Optimalisasi Aset Dengan Sistem Informasi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Analisis, Desember 2017, Vol. 6 No. 2: 164 - 172*, 6(2), 164-172. <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/e3e3b72c159e7972d668cb49846ac6.pdf>
- Hanis, M. H., Trigunaryah, B., & Susilawati, C. (2011). The application of public asset management in Indonesian local government: A case study in South Sulawesi province. *Journal of Corporate Real Estate*, 13(1), 36-47. <https://doi.org/10.1108/14630011111120332>
- Hernandez, M. (2008). Promoting stewardship behavior in organizations: A leadership model. *Journal of Business Ethics*, 80(1), 121-128. <https://doi.org/10.1007/s10551-007-9440-2>
- Jatmiko, B., Irawan, D., MacHmuddah, Z., & Laras, T. (2020). Factors Affecting Regional Government Financial Statements: Evidence from Indonesia. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 9(2), 89-100. <https://doi.org/10.36941/ajis-2020-0026>
- Jatmiko, B., Laras, T., & Wijayanti, A. (2020). Factors Influencing the Implementation of Non-profit Organization Financial Statements of Political Parties: Evidence from Indonesia. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(11), 185-194. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no11.185>
- Kaganova, O., & Amoils, J. M. (2020). Central government property asset management: a review of international changes. *Journal of Corporate Real Estate*, 22(3), 239-260. <https://doi.org/10.1108/JCRE-09-2019-0038>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Laporan Keuangan Pemerintah*

Pusat Tahun 2020.

- Kurniyanta, A., Roziq, A., & Sularso, R. A. (2018). Analisis Pengaruh Manajemen Aset, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pendapatan Dengan Optimalisasi Aset Idle Sebagai Variabel Intervening. *Bisma*, 12(1), 131. <https://doi.org/10.19184/bisma.v12i1.7610>
- Kusnawati, E. F., Amartur, K., Armanu, & Djumilah, H. (2019). Effectiveness of Asset Management in the Public Sector With the Application of Asset Management, Accountability, Monitoring and Evaluation, and Quality of Human Resources. *Journal of Applied Management (JAM)*, 17(4), 567-575.
- Lu, Y. (2017). Public Capital Asset Management: A Holistic Perspective. *Journal Of Public Procurement Vol. 17*, 483-524, 4(4), 1-42.
- LHP Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021. https://www.bpk.go.id/laporan_hasil_pemeriksaan#
- Mardianto, P. (2021). Performance Analysis of Asset BMN Managers At The Head Office Ministry of Health os The Republic of Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 8(1), 33-54. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i1.17685>
- Mardiasmo, D., Sampford, C., & Barnes, P. (2012). The Exemplification Of Governance Principles Within State Asset Management Laws And Policies: The Case Of Indonesia. *Engineering Asset Management and Infrastructure Sustainability, January*. <https://doi.org/10.1007/978-0-85729-493-7>
- Nuryati, T., Pratama, B., & Refina, P. (2020). Improving the Quality of Financial Reports by Implementing SIMAK-BMN in KPU-RI. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 127(27), 157-161. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200309.035>
- Ouda, H. (2015). Towards a Practical Holistic Accounting Approach for Governmental Capital Assets: An Accountability and Governance Perspective. *Conference - Pasundan University - Bandung - Indoneisa - November 16-17*, 1-22.
- Pasoloran, O., & Rahman, F. A. (2001). Teori Stewardship: Tinjauan Konsep Dan Implikasinya Pada Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. In *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* (Vol. 3, Issue 2, pp. 419-432). <https://jurnaltsm.id/index.php/JBA/article/view/518>
- Pekei, B., Hadiwidjojo, D., & Djumahir, S. (2014). The Effectiveness of Local Asset Management (A Study on The Government of Jayapura). *International Journal of Business and Management Invention*, 3(3), 16-26.
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. In *Jdih Bpk Ri* (pp. 1-113). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5464/pp-no-27-tahun-2014>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah* (pp. 1-66).
- Puspitarini, I., Firmansyah, A., & Handayani, D. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Teknologi Informasi Terhadap Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua Pada Pengelolaan Barang Milik Negara. *Journal of*

- Applied Managerial Accounting*, 1(2), 141-149.
<https://doi.org/10.30871/jama.v1i2.501>
- Rachmawati, R., Arwati, D., Herawati, S. D., & Arnan, S. G. (2018). Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Penatausahaan Asset/ Barang Milik Daerah. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 10(2), 189-198.
<https://doi.org/10.17509/jaset.v10i2.15159>
- Raharjo, E. (2007). Teori Agensi dan Teori Stewardship Dalam Perspektif Akuntansi. *Fokus Ekonomi*, 37-46.
https://doi.org/10.1142/9789814632775_0003
- Sahabuddin, Sutrisno, T., Subekti, I., & Andayani, W. (2021). *The effect of public governance, human resource quality, characteristics of the government internal supervisory apparatus, and the government internal supervisory system on the quality of local government financial report*. 7(Accounting), 1535-1546.
<https://doi.org/10.5267/j.ac.2021.5.017>
- Salmiah, N., Wardi, J., & Nanda, S. T. (2018). The Analysis of Utilization of Government Asset: Riau Mainland Context. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 175(1), 1-8. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012061>
- Sanjaya, K. E., & Utama, M. S. (2020). Asset management performance in the government of Jembrana Bali Regency. *International Research Journal of Management, IT & Social Sciences*, 7(4), 24-35.
- Schraven, D., Hartmann, A., & Dewulf, G. (2011). Effectiveness of infrastructure asset management: Challenges for public agencies. *Built Environment Project and Asset Management*, 1(1), 61-74.
<https://doi.org/10.1108/20441241111143786>
- Sedarmayanti. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (D. Sumayyah (ed.); Revisi). PT Refika Aditama.
- Sianipar, A. B. (2021). *Pengaruh Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara dan Komitmen Pimpinan Terhadap Pengelolaan Aset pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Siregar, D. D. (2020). *Manajemen Aset* (A. Herry, R. E. Rianto, T. E. Sunarlistiawati, & M. A. Muttaqin (eds.)). PT Gramedia Pustaka Utama.
- Subrata, I. W., Yasa, G. W., & Astika, I. B. P. (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pada Kualitas Barang Milik Daerah. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 2, 477-508.
- Suwanda, D. (2015). Factors Affecting Quality of Local Government Financial Statements to Get Unqualified Opinion (WTP) of Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK). *Research Journal of Finance and Accounting*, 6(4), 139-157.
- Wahyuni, S., Fadah, I., & Tobing, D. S. (2018). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Melalui Pengelolaan Barang Milik Daerah. *Bisma*, 12(1), 66.
<https://doi.org/10.19184/bisma.v12i1.7602>